

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C ayat (1) yang menyatakan bahwa seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih mereka pada setiap momen pemilu. Ketentuan tersebut mendorong seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk menggunakan hak pilih mereka pada setiap pemilu (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.).

Melanjutkan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, ketentuan ini diimplementasikan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut mengatur lima jenis pemilihan, yaitu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi). Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 di seluruh daerah Indonesia, menjadi momen penting bagi partisipasi politik masyarakat, termasuk di Kabupaten Bandung karena hal ini bagian dari proses negara demokrasi. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, 2023).

Negara dengan sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu menjadi mekanisme penting dalam evaluasi dan kontrol terhadap pemerintahan dan kepemimpinan yang berlangsung (Nabaran, 2024). Jika kita bandingkan dengan beberapa daerah lain yang mengalami partisipasi politik rendah, penurunan tersebut sering kali diiringi dengan rendahnya pengetahuan

politik masyarakat (Prasetyo et al., 2023). Rendahnya pengetahuan politik sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah pemerintahan (Haq, 2024). Oleh sebab itu, peningkatan pemahaman politik melalui pendidikan politik yang inklusif dapat menjadi langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan partisipasi politik masyarakat.

Selain karena rendahnya pemahaman politik, rendahnya partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari dominasi elit dalam sistem politik yang cenderung oligarki. Dalam realitas politik modern, meskipun demokrasi menekankan partisipasi politik yang luas, pengambilan keputusan kerap dipengaruhi oleh kelompok elit yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya politik dan ekonomi (Haryanto, 2017). Di Indonesia, fenomena ini tercermin dalam munculnya dinasti politik yang menempatkan kekuasaan pada lingkaran keluarga atau kelompok tertentu secara berkelanjutan (Mietzner, 2015). Kondisi ini dapat memperkuat apatisisme politik masyarakat, terutama ketika mereka merasa tidak memiliki pengaruh nyata dalam sistem yang sudah dikendalikan elit. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan politik menjadi penting bukan hanya untuk mendorong partisipasi yang aktif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis dan kemampuan masyarakat dalam menilai dan mengontrol kekuasaan yang cenderung oligarki (Lisnawati, 2022). Sehingga upaya meningkatkan pengetahuan politik masyarakat menjadi semakin penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan.

Sebagaimana yang disinggung diatas, pengetahuan politik yang lebih baik dapat membuka jalan bagi masyarakat untuk memahami hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan politik, yang keduanya saling memengaruhi dalam menciptakan kemajuan suatu negara. Dalam poin pertama teori Pye (1966) pembangunan politik dipandang sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi, tetapi hubungan ini juga bekerja sebaliknya: pembangunan ekonomi yang stabil dapat memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan politik. Pembangunan ekonomi yang stabil berperan penting dalam mendorong pembangunan politik suatu negara. Ketika kebutuhan dasar

masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan, telah terpenuhi, individu memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan dan terlibat dalam urusan pemerintahan. Dalam konteks ini, pengetahuan politik menjadi penting agar partisipasi tersebut bersifat rasional, terinformasi, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, tanpa pengetahuan politik yang memadai, peningkatan kesejahteraan ekonomi belum tentu berdampak pada keterlibatan politik yang sehat, dan justru dapat dimanfaatkan oleh elite politik melalui praktik populisme atau *clientelism* (Sweinstani et al., 2014). Maka, pembangunan ekonomi bukan hanya tentang menciptakan kesejahteraan material, tetapi juga berperan sebagai katalisator untuk membangun kesadaran politik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus disertai dengan penguatan kapasitas politik masyarakat, salah satunya melalui pendidikan dan peningkatan pengetahuan politik.

Pengetahuan politik merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat yang aktif dan berkualitas. Pengetahuan ini tidak hanya mencakup pemahaman terhadap sistem pemerintahan, tetapi juga keterampilan dalam menganalisis kebijakan publik, mengenali aktor-aktor politik, serta menilai dampak kebijakan terhadap kehidupan sehari-hari. Masyarakat dengan tingkat pengetahuan politik yang baik cenderung lebih kritis dalam menilai kinerja pemerintahan dan lebih selektif dalam menentukan pilihan politiknya (Meutia, 2017). Di era digital saat ini, kemudahan akses informasi melalui media sosial dan platform berita *online* berpotensi meningkatkan literasi dan pengetahuan politik masyarakat. Namun, tantangan seperti maraknya disinformasi, berita palsu, dan bias informasi tetap menjadi hambatan serius. Sebagai contoh, di Indonesia peningkatan pengetahuan politik masyarakat melalui media sosial menjadi peluang dalam kesadaran politik. Oleh karena itu, perlu ada upaya sistematis untuk memperkuat literasi politik, baik melalui pendidikan formal, nonformal, maupun melalui kampanye politik yang edukatif. Pengetahuan politik yang kuat akan menciptakan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta mampu berkontribusi dalam kehidupan demokrasi secara substantif (Prayitno & Prayugo, 2023).

Sebagaimana telah disinggung di atas, syarat partisipasi pemilu yang berkualitas, yang salah satunya ialah adanya pemilih yang kritis dan cerdas. Dan hal ini akan tercapai jika pemilih *literate* (melek) secara politik. Pada titik inilah secara umum urgensi pengetahuan politik menemukan ruang konfirmasinya. Pengetahuan dan pemahaman ini sejalan dengan definisi Cassel dan Lo (1997) yang dikutip Karim dkk (2015:5) disebut sebagai *political expertise* dan *political awareness*, yang pada dasarnya merujuk pada sejauh mana seorang individu sebagai warga negara memperhatikan dan memahami berbagai isu politik. Sebagaimana dalam pemilu DPR RI, tentunya masyarakat mesti paham akan tugas dan fungsi DPR RI. *Pertama*, Legislasi dengantugasnya Menyusun Prolegnas atau Program Legislasi Nasional, Menyusun dan membahas RUU (Rancangan Undang-Undang), Menerima RUU yang diajukan DPD (Dewan Perwakilan Daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh presiden maupun DPD, Menetapkan UU bersama presiden, Menyetujui atau menolak Perppu untuk ditetapkan menjadi UU. *Kedua*, *Budgeting* atau anggaran dengan tugasnya Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, dan Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun perjanjian yang berdampak luas bagi rakyat terkait dengan beban keuangan negara. *Ketiga*, pengawasan dengan beberapa tugasnya yaitu Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah dan Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD.

Pengetahuan politik menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan partisipasi politik yang berkualitas. Pemilih yang melek politik akan mampu memahami peran dan hak politik mereka, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pemilu. Pengetahuan politik juga memungkinkan masyarakat memahami tugas dan fungsi DPR RI, seperti legislasi, *budgeting*, dan pengawasan, yang merupakan aspek penting dalam pemerintahan. Namun, rendahnya pengetahuan politik sering kali menjadi hambatan, menyebabkan

kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik. Akibatnya, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu cenderung fluktuatif di setiap periode (Affandi et al., 2019). Salah satu daerah yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini adalah Kabupaten Bandung, yang dalam beberapa periode pemilu menunjukkan angka partisipasi politik yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain contohnya Kota Bandung (jabar.kpu.go.id, n.d.). Hal ini membuka peluang untuk menelusuri sejauh mana pengetahuan politik berperan dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di wilayah tersebut. Dengan karakteristik sosial yang heterogen dan akses informasi yang semakin terbuka, Kabupaten Bandung memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik.

Kabupaten Bandung menjadi pilihan yang tepat untuk penelitian ini karena berbagai karakteristik yang menjadikannya unik dan relevan dalam konteks politik demokratis. Sebagai wilayah dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan sosial-politik yang terus meningkat, daerah ini memiliki peluang besar untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat melalui peningkatan pengetahuan politik. Selain itu, keragaman demografinya yang meliputi berbagai latar belakang budaya, ekonomi, dan pendidikan menciptakan tantangan sekaligus peluang dalam menyebarkan kesadaran politik. Hal ini membuat Kabupaten Bandung menjadi lokasi yang ideal untuk memahami bagaimana pengetahuan politik dapat mendorong partisipasi politik yang lebih berkualitas, sejalan dengan prinsip demokrasi yang sedang berkembang.

Kabupaten Bandung, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, potensi keterlibatan politik masyarakat juga semakin meningkat. Namun, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan diterapkan melalui berbagai jenis pemilihan, kuantitas penduduk tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas partisipasi politik yang baik. Faktor utama yang memengaruhi kualitas partisipasi tersebut adalah tingkat pengetahuan politik masyarakat, yang menentukan kemampuan mereka dalam membuat keputusan bijak saat memilih wakil-wakil rakyat.

Dalam konteks ini, pengetahuan politik menjadi fondasi penting bagi partisipasi politik yang berkualitas, khususnya di Kabupaten Bandung. Pengetahuan politik yang memadai mencakup pemahaman tentang proses politik, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta kesadaran akan pentingnya suara dalam memengaruhi kebijakan publik. Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilihnya secara bijak dan rasional, sehingga kontribusi mereka menghasilkan keterwakilan politik yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Menurut Almond dan Verba, partisipasi politik merupakan inti dari keberhasilan demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, atau bahkan ketiadaannya, menjadi tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutan praktik demokrasi itu sendiri (Febriantanto, 2019). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik juga menjadi indikator utama untuk menilai kualitas demokrasi di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Bandung.

Tabel 1.1 Data Partisipasi Politik Pileg DPR RI dari tahun 2014-2024
(Sumber: Data KPU Kabupaten Bandung)

Pemilu DPR RI Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Bandung					Pemilu DPR RI Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Bandung				
NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI	NO.	KECAMATAN	DATA PEMILIH	PENGGUNA HAK PILIH	PARTISIPASI
1	CILEUNYI	120.201	83.246	69,26%	1	CILEUNYI	118.766	98.801	83,19%
2	CIMENYAN	84.441	57.263	67,81%	2	CIMENYAN	80.803	66.684	82,53%
3	CILENGKRANG	34.850	25.731	73,83%	3	CILENGKRANG	35.423	30.611	86,42%
4	BOJONGSOANG	72.660	52.974	72,91%	4	BOJONGSOANG	72.109	60.736	84,23%
5	MARGAHAYU	88.522	59.950	67,72%	5	MARGAHAYU	84.583	70.522	83,38%
6	MARGAASIH	102.460	70.635	68,94%	6	MARGAASIH	101.694	83.491	82,10%
7	KATAPANG	86.213	60.398	70,06%	7	KATAPANG	84.247	70.795	84,03%
8	DAYEUHKOLOT	83.298	54.804	65,79%	8	DAYEUHKOLOT	73.453	59.797	81,41%
9	BANJARAN	84.868	65.836	77,57%	9	BANJARAN	87.348	76.024	87,04%
10	PAMEUNGPEUK	52.809	41.527	78,64%	10	PAMEUNGPEUK	55.101	47.628	86,44%
11	PANGALENGAN	104.415	81.500	78,05%	11	PANGALENGAN	104.222	90.035	86,39%
12	ARJASARI	70.103	50.470	71,99%	12	ARJASARI	71.977	60.063	83,45%
13	CIMAUNG	57.745	43.553	75,42%	13	CIMAUNG	59.347	50.629	85,31%
14	CICALENGKA	88.603	60.184	67,93%	14	CICALENGKA	83.224	69.857	83,94%
15	NAGREG	36.544	27.327	74,78%	15	NAGREG	38.135	32.391	84,94%
16	CIKANCUNG	63.444	45.008	70,94%	16	CIKANCUNG	65.624	54.717	83,38%
17	RANCAEKEK	134.091	92.495	68,98%	17	RANCAEKEK	129.173	104.627	81,00%
18	CIPARAY	115.897	84.778	73,15%	18	CIPARAY	118.882	98.391	82,76%
19	PACET	80.094	56.275	70,26%	19	PACET	79.228	63.503	80,15%
20	KERTASARI	48.566	39.860	82,07%	20	KERTASARI	49.065	43.627	88,92%
21	BALEENDAH	180.200	117.674	65,30%	21	BALEENDAH	177.551	141.920	79,93%
22	MAJALAYA	112.577	88.235	78,38%	22	MAJALAYA	109.610	95.433	87,07%
23	SOLOKANJERUK	57.166	46.911	82,06%	23	SOLOKANJERUK	59.679	52.946	88,72%
24	PASEH	89.862	66.586	74,10%	24	PASEH	91.198	77.138	84,58%
25	IBUN	56.539	45.638	80,72%	25	IBUN	59.192	52.471	88,65%
26	SOREANG	76.964	59.494	77,30%	26	SOREANG	77.443	67.119	86,67%
27	PASIRJAMBU	61.023	47.823	78,37%	27	PASIRJAMBU	62.604	53.311	85,16%
28	CIWIDEY	57.807	44.829	77,55%	28	CIWIDEY	59.089	51.025	86,35%
29	RANCABALI	38.033	28.877	75,93%	29	RANCABALI	35.078	30.419	86,72%
30	CANGKUANG	52.956	43.975	83,04%	30	CANGKUANG	55.386	45.988	83,03%
31	KUTAWARINGIN	65.994	52.296	79,24%	31	KUTAWARINGIN	70.301	61.435	87,39%
KABUPATEN BANDUNG		2.458.945	1.796.152	73,05%	KABUPATEN BANDUNG		2.449.535	2.062.134	84,18%

Pemilu DPR RI Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Bandung				
	Keterangan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Jumlah Pemilih dalam DPT	1.345.197	1.310.017	2.655.214
	Pengguna Hak Pilih	1.111.358	1.150.129	2.261.487
	Persentase Partisipasi Politik (%)	82,62%	87,79%	85,17%

Pada tabel 1.1 diatas, dari data KPU Kabupaten Bandung, Pemilu Legislatif DPR RI tahun 2014, tingkat partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung berada di angka sekitar 70%. Namun, pada Pemilu 2019, partisipasi meningkat drastis hingga mencapai lebih dari 80%. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2024, dengan persentase partisipasi yang stabil di atas 85%. Peningkatan partisipasi ini menunjukkan adanya dinamika positif dalam perilaku pemilih.. Meskipun angka partisipasi belum dapat secara langsung dijadikan indikator tunggal untuk menilai tingkat kesadaran atau kematangan politik masyarakat, tren ini memberikan sinyal awal bahwa ada kemungkinan peningkatan akses informasi politik, perhatian terhadap isu-isu publik, atau bahkan pemahaman politik yang lebih baik di kalangan warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk menelusuri apakah peningkatan partisipasi ini berkorelasi atau bahkan dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan politik masyarakat Kabupaten Bandung.



Gambar 1.1 Grafik Partisipasi Politik Pileg DPR RI dari tahun 2014-2024 di Kabupaten Bandung
(Sumber: Data di olah peneliti)

Pada Gambar 1.1 hasil dari grafik diatas, tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Bandung pada Pemilu Legislatif DPR RI tahun 2014 mencapai 73,05%. Angka ini bertambah pada tahun 2019 menjadi 84,18%, dan terus bertambah menjadi 85,17% pada Pemilu 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan antusiasme masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi, yang dapat menjadi indikasi awal dari meningkatnya kesadaran politik. Namun demikian, peningkatan kuantitatif ini masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk melihat apakah disertai dengan peningkatan kualitas partisipasi, seperti pemahaman terhadap isu politik, kebijakan, dan peran lembaga legislatif. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri sejauh mana pengetahuan politik berperan dalam mendorong peningkatan tersebut.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki karakteristik budaya, suku, dan bahasa yang serupa, seperti Kota Bandung, pola partisipasi politik tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten. Kota Bandung, yang dikenal sebagai pusat pendidikan dan budaya di Jawa Barat, mengalami tingkat partisipasi politik yang fluktuatif.

Tabel 1.2 Data Partisipasi Politik Pileg DPR RI dari tahun 2014-2024
(Sumber: Data KPU Kota Bandung)

Pemilihan DPR RI Tahun 2014			
Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah pemilih dalam DPT	832,361	828,983	1,661,344
Pengguna Hak Pilih	601,164	643,492	1,244,656
Presentasi Partisipasi Politik	72.22%	77.62%	74.92%

Pemilihan DPR RI Tahun 2019			
Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah pemilih dalam DPT	862,997	871,655	1,734,652
Pengguna Hak Pilih	725,659	769,165	1,494,824
Presentasi Partisipasi Politik	84.09%	88.24%	86.17%

Pemilihan DPR RI Tahun 2024			
Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah pemilih dalam DPT	926,295	946,086	1,872,381
Pengguna Hak Pilih	746,505	808,361	1,554,866
Presentasi Partisipasi Politik	80.59%	85.44%	83.04%

Pada tabel 1.2 Data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2014, tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandung mencapai 74.92%, meningkat menjadi 86,17% pada Pemilu 2019, namun justru menurun menjadi 83.04% pada Pemilu 2024. Fluktuasi tingkat partisipasi masyarakat Kota Bandung dalam tiga periode Pemilu Legislatif menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam perilaku politik masyarakat, kondisi ini menyoroti naik turunnya partisipasi pada pemilu dan menunjukkan pentingnya memahami lebih dalam pengaruh variabel seperti pengetahuan politik dalam mendorong partisipasi yang stabil dan berkelanjutan.



Gambar 1.2 Grafik Partisipasi Politik Pileg DPR RI dari tahun 2014-2024 Kota Bandung dan Kabupaten Bandung
(Sumber: Data di olah peneliti)

Pada gambar 1.2 Menunjukkan perbedaan tren partisipasi politik antara Kabupaten Bandung dan Kota Bandung menunjukkan dinamika dalam partisipasi politik masyarakat. Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi politik di Kabupaten Bandung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara Kota Bandung menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Terlihat jelas bahwa pada tahun 2024, terjadi penurunan angka partisipasi politik di Kota Bandung, yang berbeda dengan tren positif yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini mencerminkan perbedaan dinamika partisipasi politik di kedua daerah tersebut

dan perbedaan ini menjadi dasar yang kuat untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik, khususnya pengetahuan politik sebagai variabel yang potensial memberikan pengaruh signifikan.

Penelitian ini menjadi penting karena hingga saat ini belum banyak studi yang secara khusus mengkaji pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bandung dalam konteks Pemilu Legislatif DPR RI. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih terfokus pada konteks pendidikan politik formal atau pelatihan tertentu, seperti penelitian Sintia (2022) yang meneliti pengaruh pendidikan politik terhadap peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Kabupaten Bandung. Sementara itu, penelitian lain seperti oleh Fauziah (2022) di Desa Karangtanjung, Bima (2023) di Desa Sukaharja, Karawang, dan Novie (2023) di Cipancar, Subang, membuktikan adanya pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi masyarakat, namun dalam konteks Pilkada dan wilayah yang berbeda.

Dengan meningkatnya angka partisipasi masyarakat Kabupaten Bandung dari Pemilu 2014 ke 2024, penting untuk mengkaji apakah peningkatan ini juga diiringi oleh peningkatan kualitas pengetahuan politik masyarakat, bukan sekadar mobilisasi atau kepentingan sesaat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kekosongan kajian tersebut serta menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu dalam merancang strategi peningkatan literasi politik masyarakat secara lebih substansial. Dengan latar belakang ini, penulis merasa sangat tertarik untuk meneliti pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung pada Pileg DPR RI di Pemilu 2024.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan, maka dapat diketahui masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung pada Pileg DPR RI tahun 2024?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

Menganalisis pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung pada Pileg DPR RI tahun 2024.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting untuk memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama dalam ranah sosial dan politik. Selain itu, sebagai penerapan dari teori yang telah dikaji dan amati, dengan mengimplementasikan konsep-konsep dalam Ilmu Politik terhadap fakta dan realitas yang terjadi di masyarakat. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk memahami bagaimana tingkat pengetahuan politik dapat mendorong partisipasi politik.

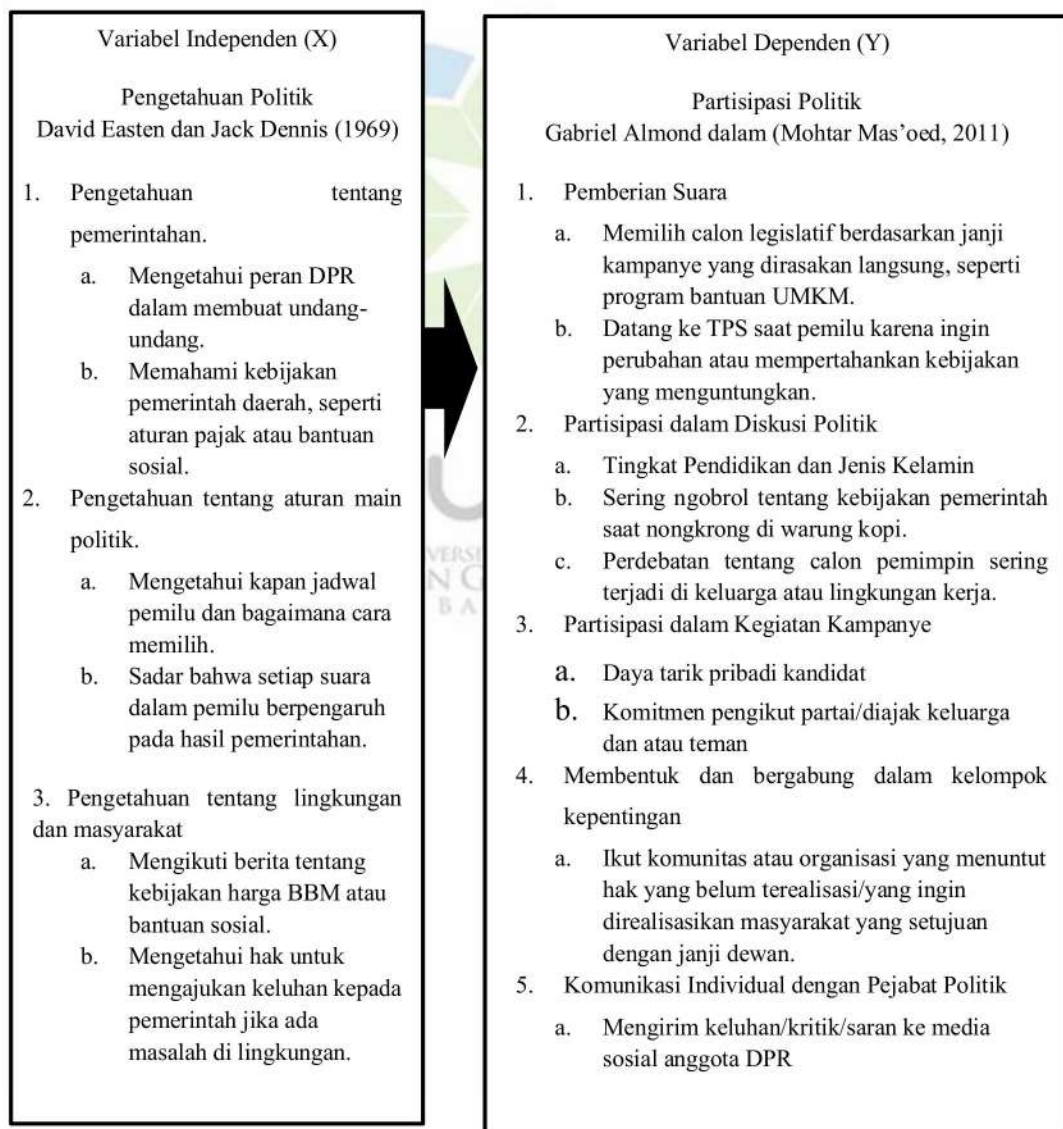
2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan bukti nyata dalam menyelesaikan pendidikan strata 1 di jurusan Ilmu Politik. Bagi instansi, penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi dan bahan evaluasi bagi instansi terkait untuk mengembangkan pendidikan politik agar lebih berdampak signifikan bagi masyarakat. Penelitian ini juga dapat memberikan informasi berharga dan mendorong peningkatan partisipasi politik masyarakat di masa depan.

E. Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 salah satunya memilih DPR RI perlu adanya asas-asas yang mesti dijalankan oleh seluruh pihak baik masyarakat maupun aktor politik agar pemilu berjalan baik dan lancar tanpa mencederai demokrasi yang berbuah konflik. Asas-asas tersebut antara lain langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam mewujudkan asas-asas tersebut tentu memiliki tantangan yaitu pengetahuan politik dan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan guna menganalisis pengetahuan politik dan menganalisis partisipasi politik masyarakat Kabupaten Bandung serta

menganalisis sejauh mana pengaruh pengetahuan politik terhadap partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Bandung. Dalam konteks ini, pengetahuan politik dianggap sebagai dasar perilaku politik individu. Karena ketika individu memiliki kesadaran politik yang diperoleh melalui pengetahuan mereka, hal tersebut dapat mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam politik. Ini menunjukkan bahwa warga memahami dan mengikuti isu-isu politik serta ingin terlibat dalam kegiatan politik terkait Pemilu Serentak tahun 2024 di Kabupaten Bandung. Berdasarkan hal tersebut, kerangka berpikir penelitian ini diilustrasikan pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berpikir

F. Hipotesis

Menurut Nuryadi, (2017:74) hipotesis penelitian adalah dugaan atas jawaban sementara atau kesimpulan sementara dari terhadap rumusan masalah penelitian. Kata “sementara” diartikan sebagai hasil dugaan dari teori yang relevan namun belum didukung oleh data empiris yang telah dikumpulkan melalui pengumpulan data. Berdasarkan penjelasan ini, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H_0 : Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan politik masyarakat terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Legislatif DPR RI pada Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Bandung.
2. H_a : Ada pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan politik masyarakat terhadap partisipasi politik pada Pemilihan Legislatif DPR RI pada Pemilihan Umum Serentak 2024 di Kabupaten Bandung.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada bagaimana tingkat pengetahuan politik masyarakat Kabupaten Bandung dapat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam proses politik, khususnya dalam pemilihan legislatif DPR RI tahun 2024.

